

MEDIASI MERUPAKAN SALAH SATU ALTERNATIF PENYELESAIAN MASALAH DALAM SENGKETA PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Oleh : Revy S.M. Korah¹

A. PENDAHULUAN

Mediasi adalah satu diantara sekian banyak Alternatif Penyelesaian Sengketa atau biasa dikenal dengan istilah "*Alternative Dispute Resolution*" yang tumbuh pertama kali di Amerika Serikat. Mediasi dapat dilihat sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*non litigasi*) yang merupakan salah satu bentuk dari Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau Alternatif Dispute Resolution (ADR) akan tetapi dapat juga berwujud mediasi peradilan (*Court Mediation*). Mediasi ini lahir dilatarbelakangi oleh lambannya proses penyelesaian sengketa di pengadilan, oleh karena itu mediasi ini muncul sebagai jawaban atas ketidakpuasan yang berkembang pada sistem peradilan yang bermuara pada persoalan waktu, biaya dan kemampuannya dalam menangani kasus yang kompleks. Pada hal di nusantara telah lama dipraktekkan tentang penyelesaian sengketa melalui musyawarah. Istilah khusus dalam pengadilan disebut dengan mediasi.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia umumnya dihadapkan pada sejumlah hak dan kewajiban. Tuntutan akan haknya akan semakin menonjol bila pemenuhannya berkaitan langsung dengan kebutuhan pokok, seperti sandang, pangan, papan, dan lahan (atau tanah). Semakin berkembangnya hubungan antar negara dalam era globalisasi saat ini membuat potensi konflik semakin besar diantara negara-negara. Hal ini dikarenakan munculnya perbedaan pendapat yang amat besar mengenai sebuah fakta. Sengketa antar negara pun semakin mudah terjadi.

Dalam proses penyelesaian sengketa, dikenal beberapa jenis upaya penyelesaian sengketa. Sebuah sengketa internasional dapat diselesaikan melalui jalur kekerasan ataupun dengan cara damai. Tindakan kekerasan dapat berupa perang, tindakan bersenjata non-perang, retorsi, reprisal, blokade damai, embargo, maupun intervensi. Sedangkan cara damai dapat ditempuh melalui jalur pengadilan yang dapat berupa arbitrase internasional atau pengadilan internasional, maupun melalui jalur diluar pengadilan yang dapat berupa negosiasi, mediasi, jasa baik, konsiliasi, penyelidikan, penemuan fakta, penyelesaian regional, maupun melalui PBB. Penyelesaian sengketa secara damai diatur dalam beberapa pengaturan internasional antara lain pada Konvensi Den Haag 1899/1907, Briard Kellog Pact 1928, dan Piagam PBB.

¹ Dosen Pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Jenis-jenis dari Mediasi itu ?
2. Sisi Positif dan Negatif pada Budaya Mediasi?

C. METODE PENULISAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dan tipe kajian hukumnya adalah komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian dan pembahasan dijabarkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah.

Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum positif tertulis bentukan lembaga perundang-undangan (undang-undang dasar), kodifikasi, undang-undang, peraturan pemerintah, dan seterusnya dan norma hukum tertulis bentukan lembaga peradilan (*judge made law*), serta hukum tertulis buatan pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, dokumen hukum, laporan hukum, catatan hukum, dan rancangan undang-undang).²

D. PEMBAHASAN

1. Jenis-jenis Mediasi

Mediasi dapat dibagi menjadi dua kategori yakni mediasi di pengadilan (litigasi) dan mediasi di luar pengadilan (non litigasi). Di banyak negara, mediasi merupakan bagian dari proses litigasi, hakim meminta para pihak untuk megusahakan penyelesaian sengketa mereka dengan menggunakan proses mediasi sebelum proses pengadilan dilanjutkan. Inilah yang disebut dengan mediasi di pengadilan. Dalam mediasi ini, seorang hakim atau seorang ahli yang ditunjuk oleh para pihak dalam proses pengadilan, bertindak sebagai mediator. Di banyak negara, seperti Amerika Serikat telah lama berkembang suatu mekanisme, di mana pengadilan meminta para pihak untuk mencoba menyelesaikan sengketa mereka melalui cara mediasi sebelum diadakan pemeriksaan.

Ada beberapa model mediasi yang perlu diperhatikan oleh pelajar dan praktisi mediasi. Lawrence Boulle, professor of law dan associate director of the Dispute Resolution Center, Bond University mengemukakan bahwa model-model ini didasarkan pada model klasik tetapi berbeda dalam hal tujuan yang hendak dicapai dan cara sang mediator melihat posisi dan peran mereka. Boulle menyebutkan ada empat model mediasi, yaitu: *settlement mediation*, *facilitative mediation*, *transformative mediation*, dan *evaluative mediation*.

²Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 52.

Settlement mediation yang juga dikenal sebagai mediasi kompromi merupakan mediasi yang tujuan utamanya adalah untuk mendorong terwujudnya kompromi dari tuntutan kedua belah pihak yang sedang bertikai. Dalam mediasi model ini tipe mediator yang dikehendaki adalah yang berstatus tinggi sekalipun tidak terlalu ahli di dalam proses dan teknik-teknik mediasi.

Facilitative mediation yang juga disebut sebagai mediasi yang berbasis kepentingan (*interest-based*) dan *problem solving* merupakan mediasi yang bertujuan untuk menghindarkan *disputants* dari posisi mereka dan menegosiasikan kebutuhan dan kepentingan para *disputants* dari pada hak-hak legal mereka secara kaku. Dalam model ini sang mediator harus ahli dalam proses dan harus menguasai teknik-teknik mediasi, meskipun penguasaan terhadap materi tentang hal-hal yang dipersengketakan tidak terlalu penting. Dalam hal ini sang mediator harus dapat memimpin proses mediasi dan mengupayakan dialog yang konstruktif di antara *disputants*, serta meningkatkan upaya-upaya negosiasi dan mengupayakan kesepakatan.

Transformative mediation yang juga dikenal sebagai mediasi terapi dan rekonsiliasi, merupakan mediasi yang menekankan untuk mencari penyebab yang mendasari *munculnya* permasalahan di antara *disputants*, dengan pertimbangan untuk meningkatkan hubungan di antara mereka melalui pengakuan dan pemberdayaan sebagai dasar dari resolusi (*jalan keluar*) dari pertikaian yang ada. Dalam model ini sang mediator harus dapat menggunakan terapi dan teknik *professional* sebelum dan selama proses mediasi serta mengangkat isu relasi/hubungan melalui pemberdayaan dan pengakuan.

Sedangkan *evaluative mediation* yang juga dikenal sebagai mediasi *normative* merupakan model mediasi yang bertujuan untuk mencari kesepakatan berdasarkan pada hak-hak legal dari para *disputants* dalam wilayah yang diantisipasi oleh pengadilan. Dalam hal ini sang mediator haruslah seorang yang ahli dan menguasai bidang-bidang yang dipersengketakan meskipun tidak ahli dalam teknik-teknik mediasi. Peran yang bisa dijalankan oleh mediator dalam hal ini ialah memberikan informasi dan saran serta persuasi kepada para *disputants*, dan memberikan prediksi tentang hasil-hasil yang akan didapatkan.³

Garry Goodpaster menyatakan bahwa, mediasi tidak selalu tepat untuk diterapkan terhadap semua sengketa atau tidak selalu diperlukan untuk menyelesaikan semua persoalan dalam sengketa tertentu. Mediasi akan berhasil atau berfungsi dengan baik bilamana sesuai dengan syarat-syarat. Syarat-syarat tersebut diantaranya, para pihak mempunyai kekuatan tawar-menawar yang sebanding, para pihak menaruh perhatian terhadap hubungan di masa depan, terdapat persoalan yang memungkinkan terjadinya pertukaran (*trade offs*), terdapat urgensi atau batas waktu untuk menyelesaikan, tidak

³ David Spencer, Michael Brogan, 2006: hal 101-103

memiliki permusuhan yang berlangsung lama dan mendalam, apabila para pihak mempunyai pendukung atau pengikut, mereka tidak dapat dikendalikan, menetapkan preseden atau mempertahankan suatu hak tidak lebih penting dibandingkan menyelesaikan persoalan yang mendesak, dan yang terakhir, jika para pihak berada dalam proses litigasi, kepentingan-kepentingan lainnya tidak akan diperlakukan lebih baik dibandingkan mediasi.

Sengketa diartikan oleh Mahkamah Internasional Permanen sebagai ketidaksepahaman dalam hukum ataupun fakta, pandangan konflik, maupun adanya perbedaan kepentingan diantara pihak yang bersengketa. Sedangkan J.G. Merils mengartikan sengketa sebagai suatu perselisihan mengenai masalah fakta, hukum, atau politik dimana tuntutan atau pernyataan suatu pihak ditolak, dituntut balik atau diingkari oleh pihak yang lain. Salah satu upaya penyelesaian sengketa yang sering dilakukan adalah proses mediasi. Mediasi adalah penyelesaian sengketa yang biasanya dilakukan secara informal yang membutuhkan peran pihak ke tiga yang netral untuk membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara para pihak yang sedang mengalami sengketa.

Sengketa (atau konflik) akan selalu dijumpai dalam kehidupan manusia atau kehidupan bermasyarakat. Sebagai suatu fenomena sosial,⁴:

"The individual does not attain the unity of his personality exclusively by an exhaustive harmonization, On the contrary, contradiction and conflict notonly precede this unity but are operative in it at every moment of its existence".

Sesuai dengan pembahasan, maka dalam makalah ini penulis akan menggunakan istilah "sengketa", dan untuk itu rumusan yang digunakan mengacu pada pendapat Nader dan Todd yang secara eksplisit membedakan antara :

- a. Pra-konflik : adalah keadaan yang mendasari rasa tidak puas seseorang.
- b. Konflik : adalah keadaan dimana para pihak menyadari atau mengetahui tentang adanya perasaan tidak puas tersebut.
- c. Sengketa : adalah keadaan dimana konflik tersebut dinyatakan di muka umum atau dengan melibatkan pihak ketiga. Dalam kenyataan sengketa dapat timbul di antara :

Kelompok yang berbeda, misalnya pada sengketa batas tanah yang terjadi antara individu dari klen yang berbeda. Satu kelompok (*within group* atau *inter group*), misalnya pada sengketa tanah waris antar individu dari satu klen. Oleh Comaroff dan Robberts bentuk sengketa ini dinamakan 'interhouse' atau 'intergenerational'. Kelompok-kelompok (antar kelompok atau *intra group*), sengketa atau sub-sub kelompok yang otonom dalam satu kelompok atau antar kelompok yang besar yang otonom dalam masyarakat. Bentuk ini

⁴ G.Simmel tahun 1964: hal 15

dinamakan sengketa *intrahouse* oleh Comaroff dan Roberts. Cara-cara yang ditempuh untuk menyelesaikan sengketa antara lain yang mengemukakan tentang upaya-upaya seperti:⁵

- a. Penggunaan kekerasan, yaitu langsung antar pribadi
- b. Melalui upacara atau ritus, misalnya upacara adat
- c. Mempermalukan, misalnya dengan sindiran/kiasan
- d. Melalui makhluk-makhluk supernatural, misalnya dengan sampah atau magic
- e. Pengucilan

Melalui pembicaraan, yang dapat terdiri dari :

- a. Pembicaraan langsung (negoisasi)
- b. Pembicaraan tidak langsung atau dengan bantuan pihak ke-3, baik yang bertindak sebagai penengah atau penasihat (mediasi/mediator atau perantara/*go between*) maupun sebagai pihak ikut menyelesaikan (arbitrasi/*arbitration* dan peradilan/*adjudicator*)

Secara khusus membahas penyelesaian sengketa dengan menekankan pada hasil yang diperoleh dengan membedakan antara pola kompromi vs keputusan, atau negosiasi vs vonis hakim. Para pihak yang terlibat atau pada model keputusan⁶, yaitu:

- a. Hanya menyangkut dua pihak yang berkepentingan.
- b. Dengan melibatkan pihak ketiga.

Dari uraian pada Bagian 2 diperoleh gambaran bahwa mediasi adalah salah satu bentuk negoisasi antara dua individu (atau kelompok) dengan melibatkan pihak ketiga dengan tujuan membantu tercapainya penyelesaian yang bersifat kompromistis. Penunjukan pihak ketiga sebagai mediator dapat terjadi karena :

- a. Kehendaknya sendiri (mencalonkan diri sendiri)
- b. Ditunjuk oleh penguasa (misalnya 'tokoh adat')
- c. Diminta oleh kedua belah pihak Dalam hal a) dan b) pihak ketiga haruslah disetujui oleh kedua belah pihak.

Sebagai mediator, tugas utamanya adalah bertindak sebagai seorang fasilitator sehingga pertukaran informasi dapat dilaksanakan. Seorang mediator dituntut untuk bersikap bijaksana (berwibawa), dapat dipercaya (tidak boleh berpihak) dan cekatan. Dalam tahap awal negoisasi, masing-masing pihak sering terlibat dalam adu argument yang bernada emosional. Keputusan yang disepakati dapat berbentuk nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi tatanan dalam masyarakat, dimana mereka jadi anggotanya, dapat pula merupakan putusan yang tidak sejalan dengan tatanan yang ada tetapi tidak bertentangan, dan ada kemungkinan bertolak belakang dengan nilai atau norma yang berlaku.

⁵ Order and Dispute: *An Introduction to Legal Anthropology*, Harmonswoth: Penguin Books

⁶ P.H. Gulliver dan L. Nader, tahun 1969

Dapat pula terjadi setelah adu argumentasi, mediator tidak berhasil mencapai titik temu sehingga kompromi (consensus) tidak tercapai. Dengan demikian para pihak kemudian menempuh cara penyelesaian lainnya, seperti melalui pengadilan. Dari uraian di atas disimpulkan bahwa mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa yang informal dan seorang mediator baru berperan bila telah disetujui oleh para pihak. Secara umum dapat diidentifikasi beberapa kategori mediasi seperti⁷:

- a. Mediasi untuk lingkungan tempat tinggal (*neighborhood mediation*)
- b. Mediasi untuk keluarga (*family mediation*)
- c. Mediasi untuk lingkungan industri (*industrial mediation*)
- d. Mediasi untuk pemulihan (*juvenile restitution*)
- e. Bentuk mediasi lainnya seperti yang berkaitan dengan sengketa tanah, ganti rugi dan kejahatan ringan.

Dari uraian tentang bentuk-bentuk mediasi di atas tergambar bahwa mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa dapat berbentuk formal dan informal. Pengertian formal dalam hal ini dikaitkan dengan tercantumnya mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa dalam undang-undang atau peraturan tertulis, dan yang dimaksudkan dengan informal adalah pranata mediasi yang hidup dan ada dalam masyarakat namun eksistensinya tidak terumus secara tertulis.

2. Sisi Positif dan Negatif pada Budaya Mediasi

Mediasi memiliki banyak sisi positif. Menurut Bindshedler, mediasi mempunyai sisi positif sebagai berikut:

- a. Mediator sebagai penengah dapat memberikan usulan-usulan kompromi diantara para pihak.
- b. Mediator dapat memberikan usaha-usaha atau jasa-jasa lainnya, seperti member bantuan dalam melaksanakan kesepakatan, bantuan keuangan, mengawasi pelaksanaan kesepakatan, dan lain-lain.

Apabila mediatornya adalah negara, biasanya negara tersebut dapat menggunakan pengaruh dari kekuasaan terhadap para pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian sengketa. Negara sebagai mediator biasanya memiliki fasilitas teknis yang lebih memadai dari pada orang perorangan. Keunggulan mediasi dibandingkan dengan metode penyelesaian sengketa yang lain adalah proses mediasi relatif lebih mudah dibandingkan dengan alternatif penyelesaian sengketa yang lain. Para pihak yang bersengketa juga mempunyai kecenderungan untuk menerima kesepakatan yang tercapai karena kesepakatan tersebut dibuat sendiri oleh para pihak bersama-sama dengan mediator. Dengan demikian, para pihak yang bersengketa merasa memiliki putusan mediasi yang telah tercapai dan cenderung akan melaksanakan hasil kesepakatan dengan baik. Putusan mediasi juga dapat digunakan sebagai dasar bagi para pihak yang bersengketa untuk melakukan

⁷ Cecilio L. Pe *et al.*, 1988: hal . 37-38

perundingan-perundingan ataupun negosiasi diantara mereka sendiri jika suatu saat dibutuhkan bila timbul sengketa yang lain diantara para pihak yang bersengketa tanpa perlu melibatkan mediator.

Keuntungan yang lain adalah terbukanya kesempatan untuk menelaah lebih dalam masalah-masalah yang merupakan dasar dari suatu sengketa. Terkadang dalam menyikapi suatu masalah, para pihak yang berkonflik belum mengkaji secara mendalam mengenai pokok masalah yang ada. Para pihak tentu lebih mengutamakan kepentingan negaranya sendiri. Dengan adanya proses mediasi dapat dilakukan telaah yang lebih mendalam dengan informasi dan data-data yang diberikan oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Pada akhirnya telaah ini dapat lebih bersifat objektif karena didasarkan pada informasi dan kepentingan dari kedua belah pihak. Dalam proses mediasi penting bagi pihak yang bersengketa untuk saling mempercayai bahwa semua pihak akan melaksanakan hasil putusan mediasi dengan baik sehingga dapat dihindari rasa bermusuhan dan dendam.

Sedangkan sisi negatif dari mediasi adalah bisa saja mediator lebih memihak kepada salah satu pihak. Selain itu kelemahan dari proses mediasi adalah waktu yang dibutuhkan sangat lama karena harus mempertemukan kedua pihak dan kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan dan dari pertentangan-pertentangan tersebut harus dirumuskan sebuah kesepakatan. Tercapai atau tidaknya kesepakatan sangat tergantung dari itikad baik para pihak untuk menyelesaikan sengketa dalam proses mediasi. Jika tidak ada itikad baik dalam proses mediasi dari kedua belah pihak, kesepakatan tidak akan pernah tercapai dan konflik pun tidak dapat terselesaikan.

Selain itu dalam proses mediasi harus dimunculkan informasi yang cukup sebagai bahan perundingan. Informasi-informasi yang disampaikan oleh kedua belah pihak menjadi sangat penting bagi mediator untuk dapat segera memberikan pendapatnya terhadap konflik yang tengah terjadi. Selain itu kedua belah pihak harus memberikan kewenangan yang cukup bagi mediator untuk menjadi penengah dalam konflik yang sedang dihadapi oleh kedua pihak. Kepatuhan para pihak dalam menaati kesepakatan yang dibuat dan pengaruh mediator dalam proses mediasi sangat mempengaruhi kesepakatan yang akan dicapai oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Mediasi bertujuan untuk menciptakan adanya suatu kontrak atau hubungan langsung diantara para pihak. Dengan kata lain tujuan dari proses mediasi adalah dapat tercapainya kesepakatan diantara negara yang berkonflik atau paling tidak dapat terjalin komunikasi diantara negara yang berkonflik mengenai permasalahan yang sedang mereka hadapi. Sedangkan fungsi mediasi adalah untuk merencanakan suatu penyelesaian yang dapat memuaskan kedua pihak. Yang dapat berperan menjadi mediator dalam sebuah proses mediasi bisa negara, individu, organisasi internasional, atau pihak lain yang dapat membantu penyelesaian sengketa diantara negara yang berkonflik.

Mediator dapat bertindak atas inisiatif sendiri dengan menawarkan jasanya sebagai mediator, atau menerima tawaran untuk menjalankan fungsinya atas permintaan dari salah satu atau kedua belah pihak yang bersengketa. Yang terpenting adalah mediator disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Dalam proses mediasi, terdapat beberapa tahapan. Riskin dan Westbrook membagitahapan mediasi menjadi 5 tahapan yaitu:

- a. Sepakat untuk menempuh proses mediasi;
- b. Memahami masalah-masalah;
- c. Membangkitkan pilihan-pilihan pemecahan masalah;
- d. Mencapai kesepakatan;
- e. Melaksanakan Kesepakatan.

Sedangkan Kovach membagi proses mediasi kedalam 9 tahapan sebagai berikut:

- a. Penataan atau pengaturan awal;
- b. Pengantar atau pembukaan oleh mediator;
- c. Pernyataan pembukaan oleh para pihak;
- d. Pengumpulan informasi;
- e. Identifikasi masalah-masalah, penyusunan agenda, dan kaukus;
- f. Membangkitkan pilihan-pilihan pemecahan masalah;
- g. Melakukan tawar menawar;
- h. Kesepakatan;
- i. Penutupan.

Tugas mediator dalam proses mediasi tidak hanya mempertemukan kedua pihak yang bersengketa namun juga mengusulkan dasar perundingan dan ikut serta secara aktif dalam perundingan. Mediator dapat menggunakan pengaruhnya agar negara-negara yang bersengketa dapat memberikan konsesi timbal balik demi tercapainya suatu kesepakatan penyelesaian. Namun usulan-usulan yang diajukan oleh mediator tidak mengikat para pihak, diterima atau tidaknya usulan mediator tergantung pada para pihak yang bersengketa. Dalam usahanya mempertemukan kedua pihak yang bersengketa, mediator harus menciptakan forum perundingan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Dalam forum mediasi, tentu para pihak harus mengenal dengan baik siapa yang menjadi mediator. Hal ini penting karena untuk memastikan bahwa mediator tidak berpihak pada satu pihak. Mediator juga harus dapat menumbuhkan kepercayaan diantara para pihak yang bersengketa bahwa mediator dapat membantu untuk menyelesaikan masalah yang tengah terjadi. Oleh karena itu mediator harus menjelaskan peran dan wewenangnya selama dalam proses mediasi. Hal ini penting untuk mengetahui sejauh mana kewenangan mediator dalam proses mediasi dan peran apa yang akan dijalankan oleh mediator.

Setelah menjelaskan peran dan kewenangannya, mediator harus menjelaskan aturan main dalam perundingan sampai para pihak yang

bersengketa jelas tentang aturan main tersebut dan tidak ada lagi pertanyaan. Bila para pihak telah menyepakati ketentuan yang berlaku, mediator perlu menekankan kembali bahwa semua pihak akan berkomitmen untuk menaati aturan yang telah dibuat.

Dalam proses perundingan, mediator harus memberikan kesempatan bagi para pihak yang bersengketa untuk menyampaikan fakta dan posisi menurut versinya masing-masing. Mediator harus berperan aktif dalam proses ini ketika terdapat beberapa hal yang sekiranya belum jelas dan perlu diketahui oleh mediator dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada para pihak. Mediator dapat membantu para pihak untuk menentukan kepentingan yang akan dibawanya dalam proses mediasi. Setelah diketahui kepentingan para pihak, mediator membantu dalam proses melakukan tawar-menawar untuk menyelesaikan masalah.

Mediator bertugas untuk menetapkan agenda perundingan. Pertemuan antara para pihak dengan mediator dapat dilakukan secara terpisah jika sekiranya pertemuan antara kedua pihak yang bersengketa akan mempersulit proses perundingan. Setelah menetapkan agenda, mediator membantu para pihak untuk memecahkan masalah, memfasilitasi kerja sama, mengidentifikasi dan mengklarifikasi masalah, dan mengembangkan alternatif pilihan kesepakatan yang sekiranya dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa. Pilihan-pilihan tersebut kemudian disampaikan kepada para pihak agar bisa terjadi kesepakatan. Mediator juga membantu para pihak untuk mengajukan, menilai, dan memprioritaskan kepentingan-kepentingannya.

Dalam proses akhir mediasi, proses pengambilan keputusan, mediator melokalisasi pemecahan masalah dan mengevaluasi pemecahan masalah yang telah dilakukan sebelumnya. Perbedaan-perbedaan diantara para pihak dipertemukan dan diusahakan untuk diminimalisir. Selanjutnya mediator mengkonfirmasi dan mengklarifikasi kesepakatan yang akan disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Diluar kesepakatan yang akan disepakati, mediator membantu untuk membandingkan proposal penyelesaian dengan alternatif diluar kesepakatan. Mediator harus dapat mendorong para pihak untuk menghasilkan suatu pemecahan masalah dan para pihak harus dapat menerimanya. Mediator hendaknya selalu mengusahakan tercapainya win-win solution. Dalam menentukan pilihan kesepakatannya, mediator turut membantu dan akhirnya mengingatkan kembali kepada para pihak mengenai kesepakatan yang telah dicapai.

E. PENUTUP

Era modernisasi ini telah melanda negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Modernisasi yang selalu sejalan dengan makin meningkatkankesadaran seseorang akan hak dan kewajibannya, ternyata tidak selamanya menyebabkan bahwa setiap sengketa perlu diselesaikan melalui

jalur peradilan. Praktik menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan justru berkembang pula dalam berbagai sengketa di dunia bisnis. Hal ini terjadi karena para pihak di dunia bisnis ingin menjaga reputasinya (karena penyelesaiannya tidak diselesaikannya tidak disebarluaskan) dan cepat menyelesaikan sengketanya (yang bila diajukan ke pengadilan akan memakan waktu lama). Dikenalnya Badan Arbitrasi Nasional Indonesia dan lembaga Chotel (di Jepang) merupakan contoh yang di dapat dikedepankan.

Di akhir tulisan ini penyusunan berkesimpulan bahwa pranata mediasi merupakan salah satu ‘jalan keluar’ yang dapat ditempuh untuk mengurangi atau membantu mengatasi membengkaknya tumpukan dan berkas pranata di pengadilan, namun tidaklah berlebihan pula bila di alam Indonesia yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah dan mufakat kita dapat mengaktifkan lagi berbagai lagi pranata mediasi yang sudah dsan masih ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Comaroff, John L. dan Simon Robert. 1981. *Rules and Precesses*, Chicago: The University of Chicago.
- Gautama, Sudargo. 1986. *Arbitrase Dagang Internasional*, Bandung: Penerbit Alumni.
- Gulliver, P.H. 1977, „On Mediators”, dalam I. Hamnett (ed), *Social Anthopologi and Law*, London: ASA Monograph 14, 15-52.
- Gullliver, P.H. 1973. “Negotiations as a mode of dispure settlement : Towards a general model” dalam *Law and Society Review*, Vol.7, 667-691.
- Kawashima, T. 1988. “Penyelesaian Pertikaian di Jepang Kontemporer”, dalam A.A.G. Peters dan K. Siswosoebroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial*, II, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Macduff, Ian. 1988. “Mediation in New Zealand: Legislating for Community”, Dalam C. L. Pe *et al.*, 167-222.
- Nader, Laura (ed). 1969. *Law in Culture and Society*, Chicago: Aldine Publishing Company.
- Nader, Laura dan H.F.Todd, Jr. (eds).1978. *The Dispute Process: Law in Ten Societies*, New York: Columbia University Press.
- Roberts, Simon. 1979. *Order and Dispute: An Introduction to Legal Anthopology*, Harmonswoth: Penguin Books. .
- Simmel, G. 1964. *Conflict: The web of gorup affiliations*, Glencoe : The Free Press.